

Analisis Penerapan Siklus Akuntansi Pemerintah Daerah Berdasarkan SAP pada LKPD Kota Medan Tahun 2024

Anggun Paulina Manik¹ Yuliana Sari Angkat² Mawar Lestari Hutagaol³ Putri Kemala Dewi Lubis⁴ Nela Permata Sari Lubis⁵

Universitas Negeri Medan, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: anggunmanik248@gmail.com¹ yulianasariangkat@gmail.com²
mawarlestari382@gmail.com³ putrikemala@gmail.com⁴ nelapslubis@unimed.ac.id⁵

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan siklus akuntansi pemerintah daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Medan Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari dokumen LKPD Kota Medan Tahun 2024 serta laporan pemeriksaan yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan dianalisis dengan membandingkan tahapan siklus akuntansi pemerintah daerah dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan LKPD Kota Medan Tahun 2024 telah melalui tahapan siklus akuntansi pemerintah daerah yang meliputi pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan penyusunan laporan keuangan. Selain itu, laporan realisasi anggaran menunjukkan adanya peningkatan pendapatan daerah dan tercapainya surplus anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan siklus akuntansi pemerintah daerah telah berjalan sesuai dengan SAP sehingga dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kata Kunci: Siklus Akuntansi Pemerintah Daerah, SAP, LKPD, Laporan Keuangan Daerah

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the regional government accounting cycle based on Government Accounting Standards in the Regional Government Financial Statements of Medan City for the 2024 fiscal year. This research uses a qualitative approach with a descriptive method. The data used are secondary data obtained from the Medan City financial statements and audit reports issued by the Badan Pemeriksa Keuangan. Data were collected through documentation studies and analyzed by comparing the stages of the regional government accounting cycle with the provisions contained in Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. The results show that the preparation of the Medan City financial statements for 2024 has followed the stages of the regional government accounting cycle, including recording, classifying, summarizing, and preparing financial statements. In addition, the budget realization report shows an increase in regional revenue and the achievement of a budget surplus. This indicates that the implementation of the regional government accounting cycle has been carried out in accordance with Government Accounting Standards to support transparency and accountability in regional financial management.

Keywords: Regional Government Accounting Cycle, Government Accounting Standards, Regional Financial Statements



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia memberikan wewenang yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola keuangan daerah dengan cara mandiri. Dengan adanya wewenang tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola keuangan secara jelas, efisien, dan bertanggung jawab. Salah satu cara pemerintah daerah mempertanggungjawabkan kepada masyarakat adalah dengan menyusun Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD) yang dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP adalah pedoman akuntansi yang digunakan dalam membuat dan menyajikan laporan keuangan pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuan dari penerapan SAP adalah untuk meningkatkan mutu laporan keuangan pemerintah sehingga informasi yang dihasilkan menjadi lebih relevan, dapat diandalkan, dan dapat dibandingkan antar periode. Sejak diberlakukannya SAP berbasis akrual, pemerintah diwajibkan untuk mencatat pendapatan, beban, aset, dan kewajiban saat transaksi terjadi, bukan hanya saat kas masuk atau keluar. Menurut Indra Bastian (2010) dalam penelitiannya tentang Akuntansi Sektor Publik, penggunaan akuntansi berbasis akrual dalam pemerintahan dapat meningkatkan transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara karena informasi yang dihasilkan lebih komprehensif dan mencerminkan kondisi keuangan yang sesungguhnya.

Dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, terdapat langkahlangkah yang dikenal sebagai siklus akuntansi pemerintah. Siklus akuntansi adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dengan pencatatan transaksi keuangan, pengelompokan transaksi, penyusunan ringkasan dalam bentuk laporan, hingga penyajian laporan keuangan di akhir periode. Menurut Mardiasmo (2018), siklus akuntansi dalam sektor publik sangat penting dalam memproduksi laporan keuangan yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah daerah. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan SAP berdampak pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal akuntansi sektor publik mengungkapkan bahwa implementasi SAP berbasis akrual dapat meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan daerah dan mendukung terciptanya transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik (Wahana, 2019). Selain itu, penelitian lain dalam Jurnal Akuntansi dan Administrasi Publik juga menegaskan bahwa penerapan SAP secara konsisten mampu meningkatkan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga memperlancar proses pengawasan dan pengambilan keputusan oleh pihak berwenang. Meskipun demikian, dalam praktiknya, penerapan siklus akuntansi di pemerintah daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, pemahaman tentang akuntansi berbasis akrual, dan sistem informasi keuangan daerah yang belum maksimal dapat mempengaruhi kualitas penyusunan laporan keuangan daerah. Menurut Abdul Halim (2014), kesuksesan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di tingkat daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparatur pengelola keuangan dan sistem pengelolaan keuangan yang mendukung pencatatan dan pelaporan keuangan secara akurat.

Sebagai salah satu pemerintah daerah di Indonesia, Kota Medan setiap tahun menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, analisis terhadap siklus akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan daerah menjadi penting untuk menilai apakah proses pencatatan dan pelaporan keuangan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Melalui analisis terhadap LKPD Tahun 2024 Kota Medan, dapat diketahui sejauh mana siklus akuntansi pemerintah daerah telah diterapkan sesuai ketentuan SAP, serta bagaimana kualitas penyajian laporan keuangan yang dihasilkan. Berdasarkan hal itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis siklus akuntansi pemerintah daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan pada LKPD Tahun 2024 Kota Medan. Penelitian mengenai laporan keuangan pemerintah daerah menjadi penting karena laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan publik secara transparan dan akuntabel. Penyusunan laporan keuangan harus mengikuti siklus akuntansi

yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan siklus akuntansi pemerintah daerah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan Tahun 2024 serta menilai kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian akuntansi sektor publik serta menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan sehingga dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kajian Teori

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi pemerintahan merupakan suatu sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, serta melaporkan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu periode tertentu. Sistem ini bertujuan untuk menghasilkan informasi keuangan yang transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Akuntansi pemerintahan juga berfungsi sebagai alat untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan publik. Menurut Mardiasmo, akuntansi sektor publik merupakan proses pengumpulan, pencatatan, serta pelaporan informasi keuangan yang digunakan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sektor publik (Mardiasmo, 2018).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Dalam praktiknya, penyusunan laporan keuangan pemerintah di Indonesia harus mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar ini ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang menjadi pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. SAP bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan agar lebih transparan, akuntabel, serta dapat dibandingkan antar periode maupun antar entitas pemerintah. Dengan adanya standar tersebut, laporan keuangan pemerintah diharapkan mampu memberikan informasi yang relevan dan dapat dipercaya oleh para pemangku kepentingan (PP No. 71 Tahun 2010).

Basis Akrua dalam Akuntansi Pemerintahan

Penerapan SAP dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah menggunakan basis akrual. Basis akrual merupakan metode pencatatan akuntansi yang mengakui transaksi keuangan pada saat hak dan kewajiban terjadi, bukan hanya pada saat kas diterima atau dibayarkan. Penggunaan basis akrual bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi keuangan pemerintah. Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penerapan basis akrual dalam akuntansi pemerintahan dapat meningkatkan kualitas informasi keuangan serta memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai posisi keuangan pemerintah (KSAP, 2010).

Siklus Akuntansi Pemerintah Daerah

Salah satu aspek penting dalam akuntansi pemerintahan adalah siklus akuntansi pemerintah daerah. Siklus akuntansi merupakan rangkaian proses yang dilakukan secara sistematis mulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan. Proses tersebut meliputi identifikasi transaksi, pencatatan transaksi, penggolongan transaksi, pengikhtisaran transaksi, hingga penyusunan laporan keuangan. Menurut Mahmudi, siklus akuntansi pemerintah daerah merupakan proses yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk akuntabilitas

pemerintah kepada masyarakat (Mahmudi, 2016). Melalui siklus akuntansi yang sistematis, setiap transaksi keuangan pemerintah daerah dapat dicatat dan dilaporkan secara tepat sehingga dapat meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Penerapan siklus akuntansi yang baik juga akan mendukung terciptanya laporan keuangan yang berkualitas serta dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan pendapat Mahmudi yang menyatakan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah yang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan dapat digunakan sebagai alat evaluasi pengelolaan keuangan daerah (Mahmudi, 2016).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam satu periode anggaran. LKPD disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan digunakan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas pemerintah daerah. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan, laporan keuangan pemerintah daerah berfungsi sebagai sarana untuk menilai tingkat akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik (BPK, 2020). Dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam siklus akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan informasi yang relevan, andal, serta dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan. Selain itu, penerapan SAP juga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta mempermudah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga audit. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan SAP memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Mardiasmo, 2018).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara rinci dan mendalam bagaimana siklus akuntansi pemerintah daerah diterapkan dalam membuat laporan keuangan pemerintah daerah. Metode ini bertujuan untuk memahami fenomena yang diteliti berdasarkan data dan dokumen yang tersedia (Sugiyono, 2019). Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kota Medan, dengan fokus pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Medan tahun 2024. Riset ini fokus pada analisis tahapan siklus akuntansi pemerintah daerah, mulai dari proses pencatatan transaksi, pengikhtisaran, hingga penyusunan laporan keuangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai dokumen resmi yang sudah diterbitkan. Penjelasan: Pengambilan data hasil penelitian didasarkan pada laporan keuangan yang dipublikasikan di situs resmi Pemerintah Kota Medan serta dokumen pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen yang terkait dengan laporan keuangan pemerintah daerah, seperti Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Medan Tahun 2024, hasil laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta berbagai peraturan yang berhubungan dengan akuntansi sektor publik.

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menganalisis dan membandingkan tahapan siklus akuntansi pemerintah daerah yang terdapat dalam LKPD dengan ketentuan yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Peraturan yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang menjadi panduan dalam membuat

laporan keuangan pemerintah, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang mengatur cara mengelola dan melaporkan keuangan negara. Evaluasi Siklus Akuntansi Pemerintah Daerah secara sistematis, hasil analisis disajikan untuk menilai kesesuaian siklus akuntansi pemerintah daerah dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Medan dengan menggunakan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan pada tahun 2025. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi pemerintah daerah serta laporan pemeriksaan yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) mengumpulkan dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Medan Tahun 2024, (2) mengidentifikasi tahapan siklus akuntansi pemerintah daerah yang terdapat dalam proses penyusunan laporan keuangan, (3) membandingkan tahapan tersebut dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dan (4) menarik kesimpulan mengenai kesesuaian penerapan siklus akuntansi pemerintah daerah dalam penyusunan LKPD Kota Medan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini diperoleh melalui analisis terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Medan Tahun 2024 yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Data yang dianalisis meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, Surplus/Defisit Anggaran, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), serta Neraca Pemerintah Daerah.

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Medan Tahun 2024

Jenis Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	3.477.735.991.080	2.770.372.461.103	2.442.782.732.668
Pendapatan Transfer	3.582.204.963.000	3.429.257.072.514	3.260.957.621.792
Lain-lain Pendapatan yang Sah	106.469.242.121	95.291.003.471	98.840.124.289
Total Pendapatan	7.166.410.196.201	6.294.920.537.089	5.802.580.478.749

Berdasarkan tabel realisasi pendapatan daerah Kota Medan Tahun 2024, dapat diketahui bahwa total pendapatan daerah mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah. Pendapatan daerah tersebut berasal dari berbagai sumber, seperti pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dari pemerintah pusat, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur penerimaan daerah memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Total pendapatan daerah meningkat Rp.492.340.058.340 dibandingkan dengan tahun 2023.

Tabel 2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2024

Komponen PAD	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Pajak Daerah	2.963.036.949.123	2.483.892.895.537	2.108.199.782.497
Restribusi Daerah	287.995.694.769	139.920.386.103	155.490.820.088
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	18.630.706.918	16.973.995.298	15.934.174.811
Lain-lain PAD yang Sah	208.072.640.270	129.585.184.164	163.157.955.272
Total PAD	3.477.735.991.080	2.770.372.461.103	2.442.782.732.668

Berdasarkan tabel pendapatan asli daerah Kota Medan Tahun 2024, dapat diketahui bahwa PAD merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting bagi pemerintah daerah

dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Pendapatan asli daerah umumnya berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lainlain pendapatan asli daerah yang sah. Peningkatan PAD menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi sumber-sumber penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri. Komponen PAD Realisasi 2024 dan Realisasi 2023 memiliki selisih sebesar Rp.327.589.728.435

Tabel 3. Realisasi Belanja Daerah Kota Medan Tahun 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi (Rp)
Total Belanja Daerah	7.235.090.422.451	6.258.347.667.812

Berdasarkan tabel realisasi belanja daerah Kota Medan Tahun 2024, dapat diketahui bahwa pemerintah daerah telah merealisasikan belanja daerah untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik. Peningkatan belanja daerah menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah.

Tabel 4. Surplus/Defisit Anggaran Kota Medan

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan	6.294.920.537.089	5.802.580.478.749
Belanja	6.258.347.667.812	6.282.441.543.317
Surplus/Defisit	36.572.869.276	479.861.064.567

Berdasarkan perbandingan antara pendapatan dan belanja daerah Kota Medan Tahun 2024, terlihat bahwa kondisi keuangan daerah menunjukkan adanya surplus anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan belanja yang dikeluarkan selama periode anggaran. Kondisi ini mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang cukup baik dalam menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran daerah. Selisih Surplus/Defisit anggaran pada bagian Pendapatan sebesar 492.340.058.340, pada bagian Belanja selisihnya sebesar 24.093.875.505 dan pada bagian Surplus/Defisit memiliki selisih sebesar 443.288.195.291. Artinya pendapatan mengalami peningkatan sedangkan belanja sedikit menurun namun surplus yang terjadi pada tahun 2024 lebih kecil dibanding tahun 2023.

Tabel 5. SiLPA Pemerintah Kota Medan

Tahun	SiLPA (Rp)
2024	105.253.576.103
2023	68.680.226.250

Berdasarkan tabel Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kota Medan Tahun 2024, dapat diketahui bahwa pemerintah daerah mencatatkan nilai SiLPA pada akhir tahun anggaran. SiLPA menunjukkan adanya selisih lebih antara realisasi pendapatan dan penerimaan daerah dengan realisasi belanja dan pengeluaran daerah selama satu periode anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran daerah dilakukan secara cukup efektif sehingga pendapatan daerah mampu menutup seluruh belanja yang telah direalisasikan. Dalam sistem pelaporan keuangan pemerintah, SiLPA juga menjadi salah satu komponen pembiayaan yang dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. SiLPA kota Medan meningkat sebesar 36.573.349.853 apabila dibandingkan antara tahun 2024 dan tahun 2023.

Tabel 6. Neraca Pemerintah Kota Medan

Tahun	Total Aset (Rp)
2024	38.568.706.399.913
2023	36.956.177.428.429

Berdasarkan tabel neraca Pemerintah Kota Medan Tahun 2024, neraca memberikan informasi mengenai posisi keuangan pemerintah daerah pada akhir periode pelaporan. Neraca menunjukkan jumlah aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset mencerminkan seluruh sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, kewajiban menunjukkan jumlah utang atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, sedangkan ekuitas mencerminkan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Informasi yang disajikan dalam neraca sangat penting untuk menilai kondisi keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan. Berdasarkan LKPD Kota Medan tahun 2024 dan 2023 terjadi peningkatan aset sebesar 1.612.528.971.484 pada tahun 2024.

Pembahasan

Peningkatan total aset Pemerintah Kota Medan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, meningkatnya pendapatan daerah, terutama yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Kedua, adanya penambahan aset tetap berupa pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, serta pengadaan barang milik daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain itu, akumulasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang lebih besar juga dapat meningkatkan posisi kas atau aset lancar pada akhir periode. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Medan pada tahun 2024 mengalami perkembangan yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis terhadap LKPD Kota Medan Tahun 2024, dapat diketahui bahwa proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah telah melalui tahapan siklus akuntansi pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Siklus akuntansi pemerintah daerah merupakan rangkaian proses yang dimulai dari pencatatan transaksi keuangan hingga penyusunan laporan keuangan pada akhir periode anggaran. Dalam praktiknya, siklus akuntansi pemerintah daerah meliputi beberapa tahap yaitu pencatatan transaksi, penggolongan transaksi, pengikhtisaran data keuangan, serta penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pada tahap pencatatan transaksi, setiap transaksi keuangan yang terjadi di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dicatat dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Proses ini dilakukan berdasarkan dokumen sumber seperti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), bukti penerimaan kas, serta dokumen transaksi lainnya. Pencatatan transaksi ini menjadi dasar dalam proses pengolahan data keuangan pemerintah daerah. Tahap berikutnya adalah proses penggolongan dan pengikhtisaran transaksi keuangan. Pada tahap ini, transaksi yang telah dicatat kemudian dikelompokkan sesuai dengan klasifikasi akun dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Proses pengikhtisaran dilakukan melalui penyusunan buku besar serta laporan keuangan sementara yang nantinya digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Tahap akhir dalam siklus akuntansi pemerintah daerah adalah penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan LKPD Kota Medan Tahun 2024, laporan keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan

Ekuitas, Laporan Arus Kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan laporan keuangan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas pemerintah daerah dalam satu periode anggaran. Berdasarkan hasil analisis pada Laporan Realisasi Anggaran, Pemerintah Kota Medan pada tahun 2024 berhasil meningkatkan realisasi pendapatan daerah dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama berasal dari pendapatan transfer serta peningkatan penerimaan pajak daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Selain itu, realisasi belanja daerah yang mencapai lebih dari enam triliun rupiah menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan pemerintah daerah telah dilaksanakan. Namun demikian, masih terdapat selisih antara anggaran dan realisasi belanja yang menunjukkan bahwa beberapa kegiatan belum terealisasi secara optimal.

Surplus anggaran yang terjadi pada tahun 2024 juga menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami defisit anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengelola pendapatan dan belanja daerah secara lebih efektif. Selain itu, peningkatan nilai aset pemerintah daerah pada neraca menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan terus meningkatkan sumber daya ekonomi yang dimiliki untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik kepada masyarakat. Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa siklus akuntansi pemerintah daerah pada LKPD Kota Medan Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah telah berjalan dengan baik dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil analisis terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan Tahun 2024, proses penyusunan laporan keuangan telah melalui tahapan siklus akuntansi pemerintah daerah. Tahapan tersebut dimulai dari pencatatan transaksi keuangan yang terjadi selama satu periode anggaran, kemudian dilakukan penggolongan transaksi ke dalam akun yang sesuai seperti pendapatan daerah, belanja daerah, aset, dan kewajiban. Selanjutnya dilakukan proses pengikhtisaran data keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan seperti Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Pemerintah Kota Medan. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa penyusunan LKPD Kota Medan telah mengikuti siklus akuntansi pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Medan Tahun 2024 telah melalui tahapan siklus akuntansi pemerintah daerah yang meliputi pencatatan transaksi, penggolongan, pengikhtisaran, hingga penyusunan laporan keuangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendapatan daerah Kota Medan pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya serta mencatatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang menunjukkan bahwa realisasi pendapatan lebih besar dibandingkan dengan belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan siklus akuntansi pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sehingga dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pemeriksa Keuangan. (2020). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester*. Jakarta: BPK RI.
Badan Pemeriksa Keuangan. (2023). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2023*. Jakarta: BPK RI.

- Badan Pemeriksa Keuangan. (2024). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2024*. Jakarta: BPK RI.
- Ginting, C. D. B. (2021). Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dalam laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Neraca*.
- Harahap, M., & Siregar, D. (2023). *Analisis penerapan SAP berbasis akrual pada laporan keuangan pemerintah daerah*. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik Indonesia*, 8(1), 15–27.
- Hartoyo. (2019). Analisis kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. *Jurnal PenKoMi*.
- Jati, B. P. (2019). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010). *Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual*. Jakarta.
- Lestari, D., & Rahayu, S. (2020). Penerapan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual dalam pengambilan keputusan internal dan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia*, 3(2), 75–86.
- Mahmudi. (2016). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardika, I., & Ismail, T. (2022). Implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*.
- Okfitasari, A. (2014). Implementasi SAP berbasis akrual dalam penyajian akuntansi aset tetap daerah: Perspektif opini BPK. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*.
- Pemerintah Kota Medan. (2023). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2023*. Medan.
- Pemerintah Kota Medan. (2024). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2024*. Medan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. (2010). *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Pratiwi, R., & Nugroho, A. (2020). *Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah*. *Jurnal Akuntansi dan Administrasi Publik*, 5(1), 45–56.
- Rahmah, K., & Zulkifli. (2018). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Kajian Bisnis*.
- Rahmawati, N., & Susanto, B. (2022). *Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah*. *Jurnal Akuntansi Publik*, 7(1), 33–44.
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- Sari, D., & Putra, H. (2021). *Analisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan daerah*. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 9(2), 98–110
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahana. (2019). *Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah*. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 14(2), 120–132